

Prosedur Pengajuan Kredit Guna Bhakti Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Ciawi

Nai Wise Hulmun¹, Saepul Anwar²,

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda,

¹naiwiseh@gmail.com

²Saeful.anwar@unida.ac.id

ABSTRAK

Kredit Guna Bhakti merupakan produk kredit konsumtif dari Bank BJB yang ditujukan bagi pegawai dengan penghasilan tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Ciawi, termasuk dokumen, persyaratan, dan tahapan prosesnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan Account Officer, dibimbing oleh supervisor. Hasil penelitian menunjukkan dokumen penting yang harus dilengkapi meliputi identitas diri, bukti penghasilan, dan SK kepegawaian. Persyaratan utamanya adalah gaji disalurkan melalui Bank BJB dan memiliki riwayat kredit yang baik. Proses pengajuan kredit meliputi konsultasi, penyerahan dokumen, analisis kelayakan, persetujuan manajer, akad kredit, hingga pencairan dana. Penelitian ini memberikan gambaran prosedur pengajuan kredit guna memudahkan calon debitur dan meningkatkan pelayanan bank.

Kata Kunci: Bank BJB, Dokumen, Kredit Guna Bhakti, Persyaratan, Prosedur,

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat karena dipercaya oleh berbagai lapisan masyarakat untuk menyimpan dananya secara aman. Selain itu, bank juga memiliki peran yang signifikan bagi suatu negara sebagai salah satu indikator pertumbuhan perekonomian nasional (Lestari et al., 2024). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Andini et al., 2024)

Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh lembaga perbankan adalah pemberian kredit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Pasal 1 Ayat (11), kredit diartikan sebagai pemberian dana atau tagihan yang setara, yang disalurkan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya. Dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa penerima kredit memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai waktu yang disepakati, disertai dengan pembayaran bunga. Hal ini menegaskan bahwa proses pemberian kredit tidak hanya bergantung pada kemampuan finansial debitur, tetapi juga pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab antara pihak bank dan nasabah. Dengan demikian, kredit memegang peranan penting sebagai alat pendukung pertumbuhan usaha dan pembangunan ekonomi secara luas. (Rahayu et al., 2025).

Kredit merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, setiap bank berupaya untuk menyalurkan kredit secara efektif dan tepat sasaran. Di antara berbagai jenis kredit yang tersedia, kredit konsumtif menjadi salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Jenis kredit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti pembelian alat elektronik, kendaraan, perabot rumah tangga, hingga biaya perjalanan atau liburan. Meskipun tidak bersifat produktif atau digunakan untuk investasi, kredit konsumtif tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan perbankan. (Salsabilla et al., 2023).

Salah satu lembaga keuangan yang aktif dalam penyaluran kredit konsumtif adalah Bank BJB. Bank ini menyediakan berbagai jenis fasilitas kredit bagi masyarakat, baik dalam bentuk kredit produktif maupun konsumtif. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah Kredit Guna Bhakti, yaitu fasilitas kredit multiguna yang diperuntukkan bagi debitur yang memiliki penghasilan tetap, baik yang penghasilannya telah disalurkan melalui Bank BJB maupun yang belum (Rahayu et al., 2025). Kredit ini dapat diajukan melalui berbagai kantor cabang Bank

BJB, salah satunya adalah Bank BJB KCP Ciawi yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Persyaratan dalam pengajuan kredit guna bhakti mengacu pada tiga pola untuk menentukan kelayakan calon debitur yang berdasarkan pada status pekerjaan dan sistem penyaluran penghasilan mereka.

Pola 1 ditujukan bagi pegawai yang penghasilannya disalurkan langsung melalui Bank BJB (payroll), sehingga proses pemotongan angsuran dan verifikasi kemampuan bayar lebih mudah dilakukan. Pola 2 ditujukan bagi pegawai non-payroll seperti ASN, CPNS, TNI/POLRI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya, yang memerlukan dokumen pendukung tambahan karena penghasilannya tidak tercatat secara otomatis di sistem Bank BJB. Sedangkan Pola 3 bersifat fleksibel karena diperuntukkan bagi pegawai swasta, yayasan, atau lembaga sosial, baik payroll maupun non-payroll, namun dengan tantangan tersendiri terkait kestabilan penghasilan dan kelengkapan dokumen.

Berdasarkan uraian latar masalah yang disampaikan di atas penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti, khususnya di Bank BJB KCP Ciawi. Penelitian difokuskan pada identifikasi dokumen yang perlu disiapkan oleh calon debitur, persyaratan yang diberlakukan, serta proses pengajuan Kredit Guna Bhakti secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Yuliani, 2018). Untuk memperoleh informasi dari lapangan, peneliti menerapkan dua metode utama, yakni observasi langsung dan wawancara.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas untuk memperoleh data dan fakta yang sesuai dengan kondisi nyata. Peneliti melakukan observasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di

Bank BJB KCP Ciawi, khususnya pada bagian kredit konsumen. Selama proses observasi, peneliti terlibat dalam kegiatan harian kantor dengan pengawasan dari supervisor KKL, sehingga dapat memahami secara langsung tahapan-tahapan dalam prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber yang berkompeten. Dalam kegiatan ini, peneliti mewawancarai Account Officer bagian kredit konsumen, dengan didampingi oleh supervisor, untuk memperoleh informasi mendalam mengenai prosedur pengajuan KGB bagi calon debitur di Bank BJB KCP Ciawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank BJB merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Didirikan pada 20 Mei 1961, bank ini awalnya berbentuk perseroan terbatas dan kemudian berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah. Seiring waktu, Bank BJB berkembang menjadi bank umum devisa dan pelopor layanan perbankan konvensional dan syariah di tingkat daerah. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah Kredit Guna Bhakti, yaitu kredit konsumtif untuk pegawai bergaji tetap guna memenuhi kebutuhan pribadi. Produk ini tersedia di berbagai cabang, termasuk KCP Ciawi. Prosedur pengajuannya mencakup tahapan administratif dan analisis kelayakan yang harus dipenuhi calon debitur agar kredit dapat disetujui sesuai ketentuan bank.

Dokumen Pengajuan Kredit Guna Bhakti

Dokumen yang perlu dipenuhi oleh calon debitur untuk pengajuan kredit Guna Bhakti, sebagai berikut:

1. Foto suami dan istri
2. Fotocopy KTP pemohon suami/istri

3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy surat nikah/cerai
5. Fotocopy NPWP Pribadi
6. Fotocopy rekening tabungan
7. Dokumen formulir pengajuan kredit
8. Dokumen asli slip gaji terakhir
9. Dokumen asli Ledger
10. Dokumen asli Kartu Pegawai
11. Surat potong gaji
12. Dokumen asli SK
13. Dokumen asli kenaikan gaji berkala
14. Dokumen Asli TASPEN

Jenis dokumen yang dapat dijadikan agunan, sebagai berikut:

1. Kartu TASPEN (asli)
2. SK Pegawai Tetap
 - a) SK 100%
 - b) SK Terakhir
 - c) SK asli kenaikan gaji berkala
3. Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS)
 - a) Sk 80%

Persyaratan pengajuan kredit Guna Bhakti

Adapun persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit Guna Bhakti, sebagai berikut:

1. Gaji di salurkan melalui bank BJB

Salah satu syarat penting dalam pengajuan Kredit Guna Bhakti di Bank BJB adalah gaji calon debitur harus disalurkan langsung melalui rekening Bank BJB. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pemotongan angsuran kredit setiap bulannya secara otomatis dari sumber gaji. memudahkan proses pembayaran, serta

mengurangi risiko kredit macet. Syarat ini juga membantu bank memastikan penghasilan debitur stabil dan aman.

2. Tidak Masuk dalam Daftar Hitam Nasabah

Calon debitur tidak tercatat sebagai nasabah yang pernah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sebelumnya, seperti menunggak pembayaran atau tidak menyelesaikan kewajiban pinjaman. Jika pernah terjadi hal tersebut, nasabah bisa masuk daftar hitam dan pengajuan kreditnya dapat ditolak oleh bank.

3. Lolos BI Checking (iDeb SLIK OJK)

Calon debitur harus memiliki riwayat kredit yang baik berdasarkan hasil BI Checking atau informasi debitur (iDeb) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Riwayat kredit yang bersih dan lancar mencerminkan kemampuan dan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial sebelumnya.

4. Calon debitur mengisi formulir permohonan kredit

Mengisi formulir ini merupakan salah satu tahapan dalam prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti. Formulir ini berisi data-data penting yang harus diisi oleh calon debitur sebagai dasar pertimbangan pihak bank dalam menilai kelayakan permohonan kredit.

Beberapa informasi yang dicantumkan dalam formulir meliputi:

1. Data pribadi pemohon
2. Data instansi pemohon
3. Data pensiun
4. Informasi usaha
5. Penghasilan pemohon kredit
6. Data rekening
7. Data pasangan (suami/istri)
8. Keluarga dekat yang bisa di hubungi (tidak serumah dengan pemohon)

Sumber: Bank BJB, 2025

Gambar 3.1 Formulir formulir permohonan kredit

5. Surat Kuasa Pendebetan Rekening

Surat Kuasa Pendebitan Rekening adalah dokumen resmi yang berisi pemberian kuasa dari debitur kepada Bank BJB untuk mendebet rekening secara otomatis setiap bulan sesuai nominal angsuran kredit yang disepakati. Surat ini berlaku sampai kredit dinyatakan lunas dan tidak dapat dicabut kembali selama masih ada kewajiban pembayaran. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran pembayaran angsuran dan menghindari keterlambatan.

SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING

Dengan ini memberikan kuasa dengan substitusi kepada bank bjb / PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang / KCP _____, untuk mendebet rekening saya setiap bulannya dengan nomor rekening _____ sebesar Rp _____ (_____) guna membayar angsuran atas kredit yang telah saya terima sampai dengan kredit saya dinyatakan lunas oleh bank bjb termasuk dalam hal terjadi perpindahan pembayaran gaji di bank lain.

Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab – sebab yang telah ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah utang pokok berikut bunga dan denda tunggakan atas kredit yang saya terima dinyatakan lunas oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Pihak bank bjb Pemohon

Pemimpin Cabang/Manager Bisnis/
Pemimpin KCP _____

Sumber: Bank BJB, 2025

Gambar 3.2 Surat Kuasa Pendebetn Rekening

6. Surat Pernyataan dan Rekomendasi (Non Payroll)

Merupakan surat dari atasan instansi tempat pemohon bekerja yang menyatakan bahwa pemohon adalah karyawan aktif serta merekomendasikan pemohon untuk mengajukan kredit. Surat ini juga menyebutkan jumlah kredit yang diajukan dan ditandatangani oleh atasan serta bendahara sebagai bentuk dukungan terhadap permohonan kredit di Bank BJB.

SURAT PERNYATAAN DAN REKOMENDASI (non payroll)

Dengan ini menyatakan :

1. Menyatakan bahwa Pemohon adalah benar karyawan/pegawai di lingkungan instansi/dinas/kesatuan/perusahaan kami.
2. Merekomendasikan kepada pemohon tersebut untuk dapat mengajukan permohonan kredit ke bank bjb KC/KCP sebesar Rp _____.
3. Pernyataan dan rekomendasi ini kami buat atas nama jabatan dan dengan demikian apabila dikemudian hari terjadi penggantian jabatan, dengan sendirinya pernyataan ini mengikat pejabat pengganti.

Mengetahui, _____
Pemimpin / Atasan Juru Bayar Gaji / Bendahara

Stempel Instansi _____

PERALAMAN INI TELAH DISAJIKAN DENGAN KETERTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERATURAN DOKUMEN JASA KEUANGAN

Sumber: Bank BJB, 2025

Gambar 3.3 Surat Pernyataan dan Rekomendasi (non payroll)

Prosedur Pengajuan Kredit Guna Bhakti pada Bank BJB KCP Ciawi

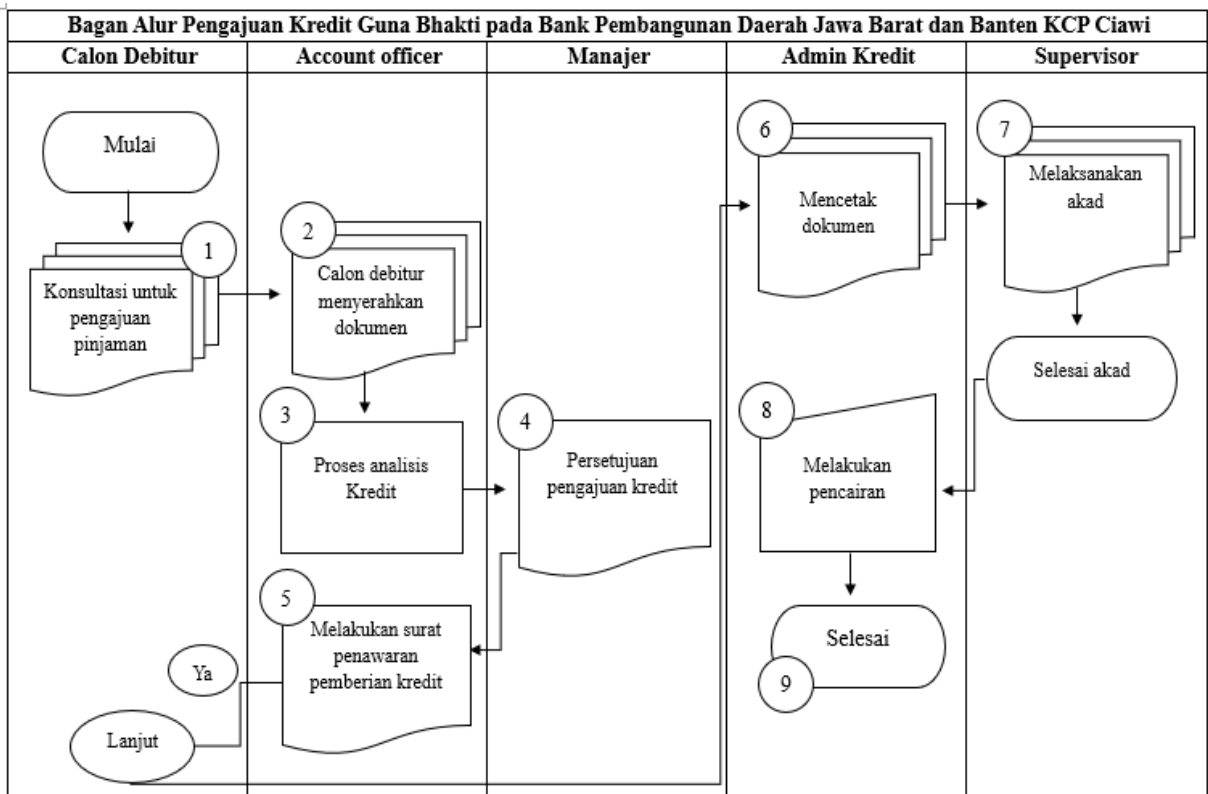
Berikut adalah penjelasan prosedur pengajuan KGB untuk calon debitur yang akan melaksanakan pinjaman di Bank BJB KCP Ciawi:

1. Calon debitur datang langsung ke kantor Bank BJB KCP Ciawi untuk berkonsultasi mengenai kebutuhan pinjamannya. Konsultasi ini dilakukan dengan Account Officer (AO) untuk mendapatkan penjelasan mengenai produk Kredit Guna Bhakti, termasuk informasi suku bunga, tenor (jangka waktu), jumlah pinjaman maksimal, dan jenis agunan yang dapat digunakan. Pada tahap ini juga AO akan menjelaskan syarat-syarat administratif yang harus dilengkapi oleh calon debitur.
2. Setelah memahami produk dan prosedur yang ditawarkan, calon debitur menyerahkan dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengajuan. Dokumen ini umumnya meliputi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, slip gaji atau bukti penghasilan, dll serta dokumen kepemilikan agunan jika ada. Penyerahan dokumen dilakukan langsung kepada AO untuk ditindaklanjuti.
3. Setelah dokumen diterima, AO akan melakukan proses analisis kredit. Analisis ini mencakup pengecekan keabsahan dokumen, penilaian terhadap kemampuan bayar calon debitur, serta kelayakan agunan. Dalam praktiknya, AO juga melakukan survei lapangan ke rumah atau tempat usaha calon debitur untuk memverifikasi informasi yang diberikan. Hasil analisis ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan memo kredit yang diajukan ke manajer.
4. Memo kredit yang dibuat oleh AO selanjutnya diserahkan kepada manajer untuk ditinjau. Manajer memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pengajuan kredit berdasarkan hasil analisis dan risiko yang mungkin ditimbulkan. Bila disetujui, maka proses berlanjut ke tahap administrasi. Jika ditolak, permohonan kredit tidak dapat diproses lebih lanjut, dan AO akan menginformasikan hasilnya kepada calon debitur.
5. Setelah pengajuan kredit disetujui, AO akan menyampaikan Surat Penawaran Pemberian Kredit kepada calon debitur. Surat ini berisi detail seperti jumlah pinjaman yang disetujui, bunga, jangka waktu angsuran, serta ketentuan lainnya.

Calon debitur diminta mempelajari dan menyetujui isi surat tersebut dengan menandatangani. Jika calon debitur tidak setuju, maka proses dihentikan atau direvisi sesuai kebutuhan.

6. Jika surat penawaran disetujui dan ditandatangani oleh nasabah, maka bagian admin kredit akan mencetak seluruh dokumen akad. Dokumen ini meliputi perjanjian kredit, surat kuasa, surat pernyataan, dan dokumen jaminan lainnya. Admin memastikan bahwa semua dokumen yang dicetak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Akad kredit dilaksanakan di kantor bank dengan disaksikan oleh Supervisor Akad. Supervisor bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa nasabah memahami isi perjanjian. Setelah semua pihak sepakat, dilakukan penandatanganan dokumen oleh pihak bank dan nasabah sebagai bentuk persetujuan resmi.
8. Setelah akad selesai, admin kredit melakukan proses pencairan dana. Dana pinjaman ditransfer ke rekening nasabah sesuai nominal yang telah disetujui. Proses pencairan hanya dilakukan apabila semua dokumen dinyatakan lengkap dan sah oleh pihak terkait.
9. Setelah dana dicairkan, proses pengajuan kredit dinyatakan selesai. Nasabah mulai memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Seluruh dokumen disimpan oleh bank sebagai arsip dan bukti hukum.

Untuk mempermudah pemahaman tahapan pengajuan KGB di Bank BJB KCP Ciawi, penulis menyajikannya dalam bentuk *Flowchart* berikut:



Sumber: Bank BJB, 2025

Gambar 3.4 Prosedur Pengajuan Kredit Guna Bhakti

KESIMPULAN

Dokumen pengajuan Kredit Guna Bhakti di Bank BJB meliputi identitas pribadi, dokumen keluarga, bukti penghasilan, serta dokumen kepegawaian seperti slip gaji, SK, dan kartu pegawai. Pegawai Tetap wajib melampirkan SK 100%, SK terakhir, dan SK kenaikan gaji berkala, sedangkan Calon Pegawai Negri Sipil wajib melampirkan SK 80%. Kelengkapan dokumen ini menjadi dasar penilaian kelayakan calon debitur serta sebagai jaminan administratif dalam proses persetujuan kredit.

Persyaratan pengajuan Kredit Guna Bhakti meliputi penyaluran gaji melalui rekening BJB, kelayakan calon debitur secara finansial dan riwayat kredit yang baik, tidak tercatat dalam daftar hitam nasabah, serta lolos BI Checking (iDeb SLIK OJK). Calon debitur juga diwajibkan mengisi formulir permohonan kredit, menandatangani

Surat Kuasa Pendebetan Rekening, dan melampirkan Surat Pernyataan serta Rekomendasi dari instansi, khususnya bagi debitur non-payroll. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses kredit dan memastikan tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari konsultasi awal antara calon debitur dan petugas bank, hingga pencairan dana. Calon debitur wajib menyerahkan dokumen persyaratan, yang kemudian dianalisis oleh Account Officer (AO) untuk menilai kelayakan kredit. Setelah dianalisis, hasilnya disampaikan kepada manajer untuk ditinjau dan disetujui. Jika disetujui, calon debitur akan menerima surat penawaran kredit dan mengikuti proses akad. Setelah dokumen akad ditandatangani dan dinyatakan lengkap, dana pinjaman dicairkan ke rekening nasabah. Seluruh proses dilakukan secara sistematis dan bertahap untuk memastikan bahwa pemberian kredit guna bhakti tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank BJB KCP Ciawi.

REFERENSI

- Lestari, M., Nugroho, G. W., & Nurodin, I. (2024). Analysis Of Credit granting Procedures Guna Bhakti (KGB) and Implantaation Principle 5C To Minimize Non Performing Loan At Bank BJB. *Akuntansi* 45, 5(2), 657-671.
- Andini, D., Andani, D., & Muhammad, A. (2024). Prosedur Administrasi Pemberian Kredit Guna Bhakti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Bank Bjb Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang. *The World of Financial Administration Journal*.
- Bank BJB. (2025). BJB Kredit Guna Bhakti <https://www.bankbjb.co.id/page/bjb-kredit-guna-bhakti>. Diakses 1 juni 2025
- Bank BJB. 2025. Website: <https://www.bankbjb.co.id/>. Diakses 1juni 2025.

- Rahayu, G. S., Widiawati, W., Asih, V. S., & Arsyad, A. (2025). Prosedur pemberian kredit guna bhakti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun. *Prosiding Artikel Mini Riset*, 1(2), 1-10.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, Volume 2 No. 2.